

Daftar Isi

Daftar Isi	1
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	3
a. Gambaran Umum Organisasi	5
b. Kepegawaian	7
2. Dasar Hukum	10
3. Isu Strategis yang dihadapi	10
4. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	12
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018	13
1. Rencana Strategi dan Target Tahun 2018	13
C. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	15
1. Target dan Analisis target Renstra 2013-2018	15
2. Capaian Kinerja Tahun 2018	16
3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	19
4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018	20
D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	23
1. Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau Tata Kelola Pemerintah	23
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	23
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	25
c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja	25
d. Kerja nyata v.s Tahun Sebelumnya	28
e. Output program/ kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/ Kegagalan program/ kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja	28
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	29
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	29
h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	30
2. Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan Sekolah	30
a. Penjelasan umum sasaran dan indikator	30
b. Instrumen/ cara perhitungan indikator	30
c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja	31
d. Kerja nyata v.s Tahun Sebelumnya	31
e. Output program/ kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/ Kegagalan program/ kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja	32
f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran	38
g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	39

h.	Solusi/ rekomendasi/ tindaklanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	39
3.	Koneksi Wifi/ Hotspot area Publik dan Koneksi CCTV	39
a.	Penjelasan umum sasaran dan indikator	39
b.	Instrumen/ cara perhitungan indikator	40
c.	Kerja nyata v.s Rencana Kerja.....	40
d.	Kerja nyata v.s Tahun Sebelumnya.....	41
e.	Output program/ kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/ Kegagalan program/ kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja	41
f.	Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran.....	45
g.	Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	46
h.	Solusi/ rekomendasi/ tindaklanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	46
4.	Rata-rata Layanan Pengaduan Masyarakat secara online yang didistribusikan Ke SKPD	47
a.	Penjelasan umum sasaran dan indikator	47
b.	Instrumen/ cara perhitungan indikator	47
c.	Kerja nyata v.s Rencana Kerja	48
d.	Kerja nyata v.s Tahun Sebelumnya.....	48
e.	Output program/ kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/ Kegagalan program/ kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja	49
f.	Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran.....	52
g.	Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran	52
h.	Solusi/ rekomendasi/ tindaklanjut untuk pencapaian kinerja sasaran	53
E.	PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018	
1.	Perbandingan Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	53
2.	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2013-2018	56
F.	KESIMPULAN / PENUTUP	60

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi

Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun LKIP. Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

a. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik .

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika;
2. Pelaksanakan kebijakan lingkup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Sekretaris, membawahi:

- i. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
- ii. Sub.Bagian Program
- iii. Sub. Bagian Keuangan

b. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumberdaya TIK :

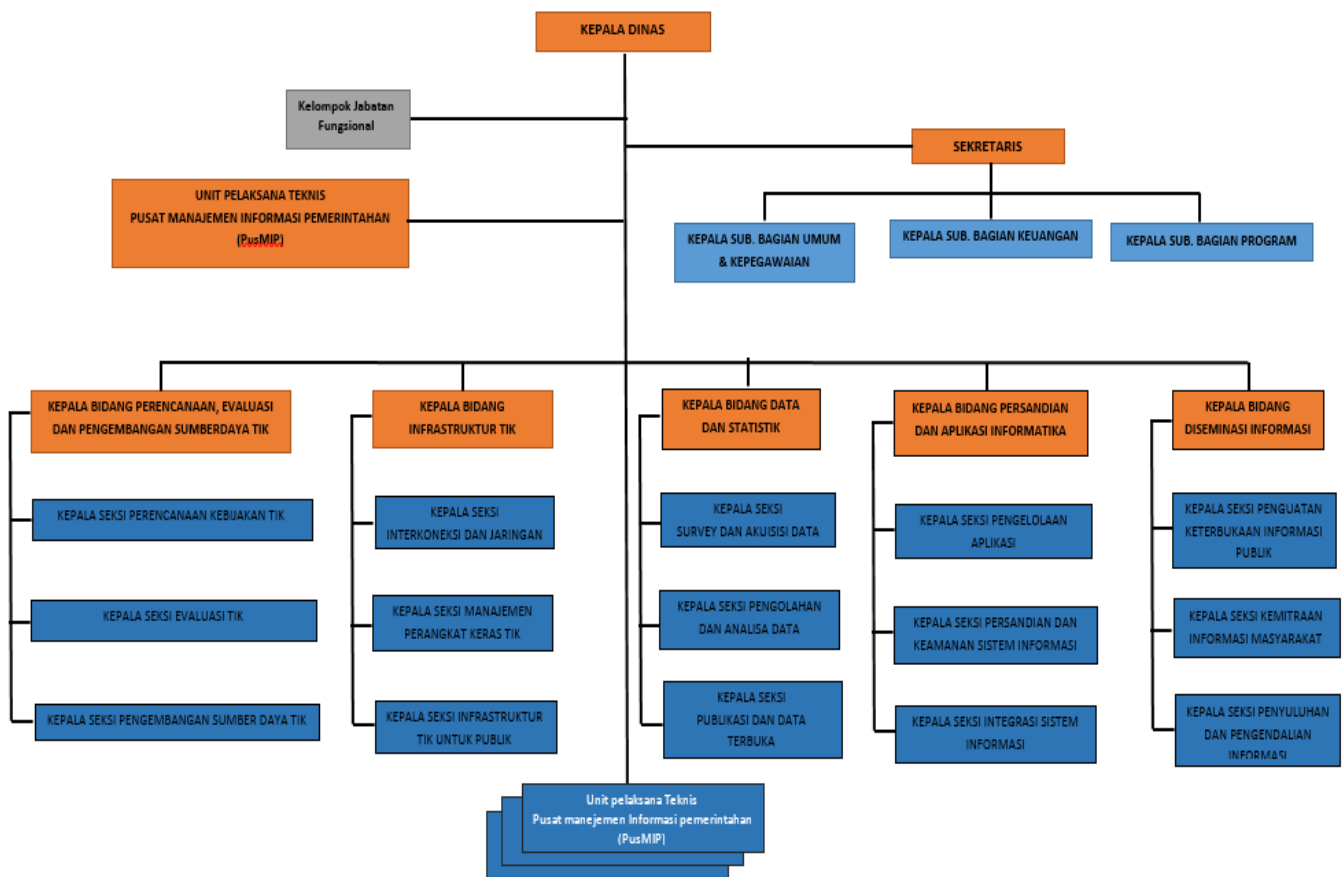
- i. Seksi Perencanaan Kebijakan TIK
- ii. Seksi Evaluasi TIK
- iii. Seksi Pengembangan Sumberdaya TIK

c. Bidang Infrastruktur TIK membawahi:

- i. Seksi Interkoneksi dan Jaringan;

- ii. Seksi Manajemen Perangkat keras TIK
- iii. Seksi Infrastruktur TIK untuk Publik
- d. Bidang Data dan Statistik, membawahi:**
 - i. Seksi Survey dan Akuisisi Data;
 - ii. Seksi Pengolahan dan Analisa Data;
 - iii. Seksi Publikasi dan Data Terbuka
- e. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika, membawahi:**
 - i. Seksi Pengelolaan Aplikasi;
 - ii. Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi
 - iii. Seksi Integrasi Sistem Informasi
- f. Bidang Diseminasi Informasi**
 - i. Seksi Penguatan keterbukaan Informasi Publik
 - ii. Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat
 - iii. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi
- g. UPT Pusat Informasi Manajemen Pemerintah (Pusmintah)**
- h. UPT Radio Sonata**
- i. Kelompok Jabatan Fungsional**

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.



Gambar 1. Organogram Diskominfo Kota Bandung

b. Kepegawaian

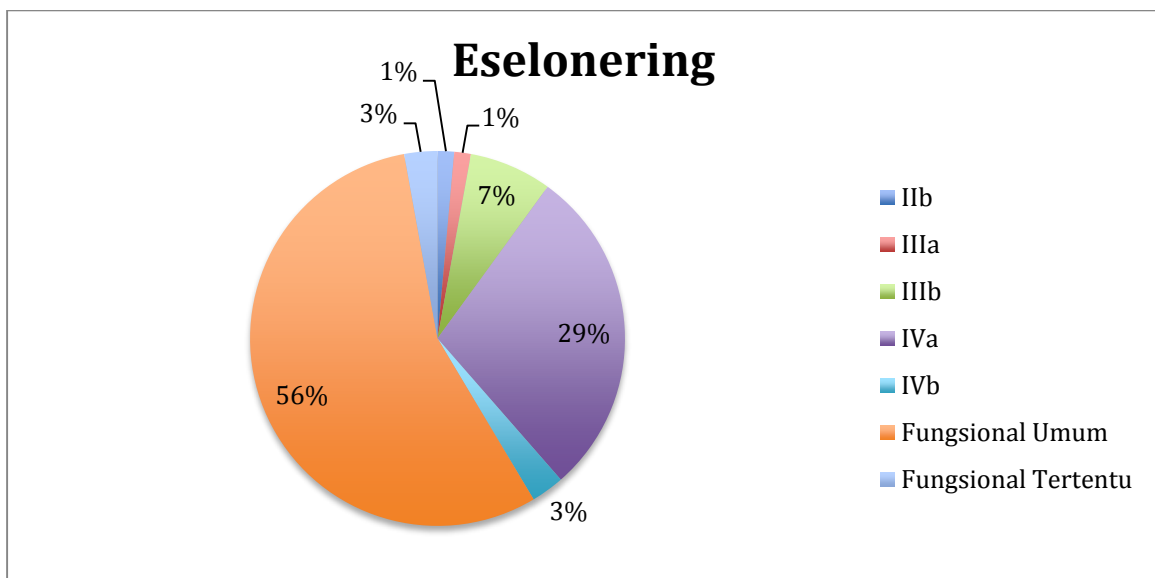
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 70 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 68 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 5 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 20 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 2 orang, fungsional umum 39 orang serta fungsional tertentu sebanyak 2 orang.



TABEL 1. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

Eselon	Jumlah	Persentase
II.b	1	1.42%
III.a	1	1.42%
III.b	5	7.14%
IV.a	20	28.57%
IV.b	2	2.85%
Fungsional Umum	39	55.71%
Fungsional Tertentu	2	2.85%

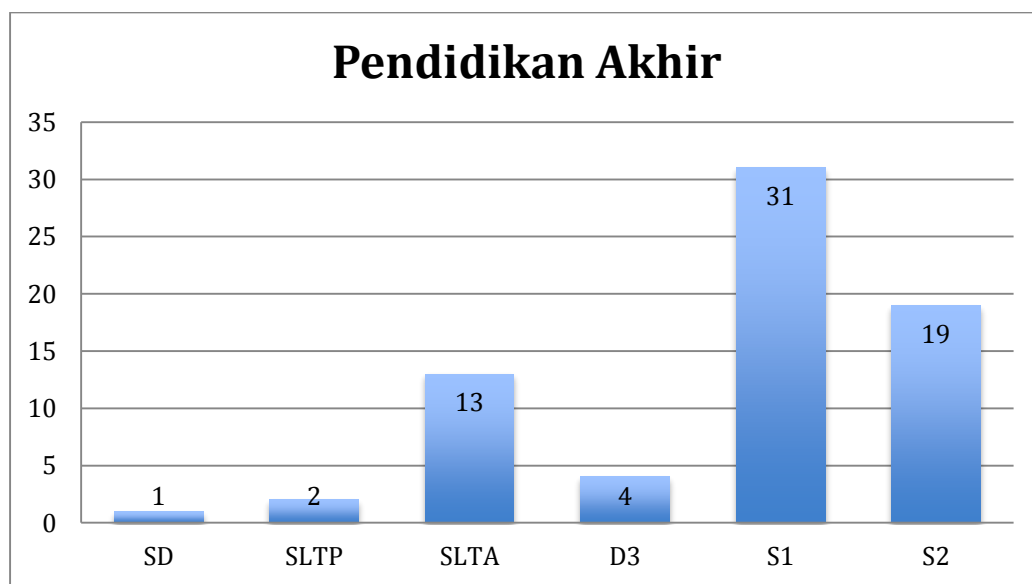
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan pendidikan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 2

TABEL 2. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
SD	1	1,42%
SLTP	2	2,85%
SLTA	13	18,57%
D3	4	5,71%
S1	31	44,28%
S2	19	27,14%



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 19 orang (27,14%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang sebanyak 2 orang, 8 orang Kepala Seksi, Subbag UPT 1 orang serta staf 6 orang, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 31 orang (44,28%), yang memiliki

pendidikan D3 sebanyak 4 orang (5,71%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 13 orang (18,57%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 2 orang (2,85%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (1,42%).

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung



3. Isu Strategis yang Dihadapi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik, Diskominfo Kota Bandung dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2013-2018, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Bandung. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:



4. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Diskominfo Kota Bandung menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja subag program di Diskominfo sebagai acuan. Dalam SOP ini tergambaran pihak-pihak yang terlibat, alur kerja serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan di review kemudian sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja Dinas.

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET
		KADIS	SEKDIS	KABID	Kasubag PROG & KEU	Pengelola Urusan LAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris Diskominfo untuk memonitor Capaian Kinerja Program dan Keuangan Diskominfo	○	Ya				Peraturan Perundang-undangan	3 menit	Perintah Pelaksana	
2	Memerintahkan Ka Subbag Prog & Keu untuk membuat dan mengumpulkan Data capaian kinerja Program dan Keuangan Diskominfo		○	Ya			Peraturan Perundang-undangan, perintah Pelaksana	3 menit	Perintah Pelaksana	
3	Memerintahkan Para Kepala Seksi Masing-masing /PPTK untuk membuat Laporan tentang Capaian Kinerja Program dan Keuangan di Bidang Masing-masing ke Sub Bagian Program & Keuangan Diskominfo.			◇	Ya		Peraturan Perundang-undangan, perintah Pelaksana	3 menit	Perintah Pelaksana	
4	Membuat konsep laporan dan surat permohonan data dan memerintahkan pengelola urusan Lakip dan Tapkin untuk mengetik serta melengkapi dokumen pendukungnya					□	Peraturan Perundang-undangan, perintah Pelaksana	5 menit	Konsep Surat Perintah Pelaksana	
5	Mengetik konsep laporan surat permohonan data serta menyiapkan form pengisian data untuk Bidang-bidang di lingkungan Diskominfo					□	Peraturan Perundang-undangan, Konsep Surat/form laporan	30 menit	Konsep surat dan Form Pengisian Data	
6	Memeriksa dan memaraf konsep kelengkapan form laporan surat kepada Sekretaris untuk diperiksa dan di paraf		Tidak			□	Peraturan Perundang-undangan, Konsep Surat / form Isian Data laporan	5 menit	Perintah pelaksana, konsep surat yg telah di disposisi dan Form Pengisian Data	
7	Memeriksa dan memaraf form laporan/surat permohonan data dan kelengkapannya dan memerintahkan Kasubag Prog & Keu untuk mengirim ke Kepala Dinas untuk di tandatangi			◇	Ya		Peraturan Perundang-undangan, Konsep Surat / form laporan yang telah di disposisi	5 menit	Perintah pelaksana, konsep surat yang telah diparaf dan di disposisi	
8	Menandatangani surat dan Memerintahkan Sekretaris untuk mendistribusikan form laporan/surat permohonan data dan kelengkapannya	Tidak		○			Konsep Surat / form laporan yang berdisposisi dan diparaf Kasubag prog & keu dan Sekretaris	3 menit	Perintah pelaksana, konsep surat yang telah ditandatangani dan di disposisi	
9	Memerintahkan para Kepala Bidang untuk menindaklanjuti perintah Kepala Dinas		Ya	◇			Surat form laporan yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan telah di disposisi	3 menit	Perintah pelaksana dan surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas	
10	Memerintahkan pengelola urusan Lakip dan Tapkin untuk menyampaikan form laporan/surat, menginventarisasi data dan entry data pada Silakip Kota Bandung					□	Surat yang telah ditandatangani Kepala Dinas	3 menit	Perintah pelaksana dan surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas	
11	Menyampaikan form laporan/surat permohonan data dan kelengkapannya ke Bidang-bidang di lingkungan Diskominfo					□	Surat yang telah ditandatangani Kepala Dinas	60 menit	Surat permohonan data dan kelengkapannya	
12	Menginventarisasi data capaian kinerja Program dan Keuangan pada Bidang-bidang sesuai waktu yang telah ditentukan					□	Surat permohonan data dan kelengkapannya	150 menit	Data Capaian kinerja program dan Keuangan Diskominfo	
13	Entry Data Capaian Kinerja dan Keuangan pada aplikasi Silakip Kota Bandung					□	Data Capaian Kinerja program dan Keuangan Diskominfo	30 menit	Input Data Online Capaian Kinerja Program dan Keuangan pada Silakip	
								303 menit		

Gambar 4 SOP Pengumpulan data LKIP Diskominfo

SOP di atas dijalankan secara efektif dalam 303 menit atau dalam 5 jam lebih 3 menit. Namun adalalalnya dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih “mentah” dan kurang teradministrasi dengan baik, serta terbatasnya waktu dikarenakan aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif dijalankan. Kurang lebih dipelukan waktu satu minggu dalam waktu kerja untuk mengumpulkan seluruh keperluan, data, dan bahan-bahan dalam penyusunan LKIP Tahun 2018 ini.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

Perencanaan kinerja Diskominfo Kota Bandung didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 revisi. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung.

Visi Diskominfo

“Terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendukung kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera”

Misi Diskominfo

Meningkatkan dan mengembangkan layanan publik serta pemberdayaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi dan layanan informasi yang lebih merata

Tujuan Diskominfo

Terwujudnya Bandung Smart City

SASARAN DISKOMINFO

- Sasaran 1 Berkembangnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis e-Government
- Sasaran2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan
- Sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, ada 4 indikator sebagai berikut;

Indikator Sasaran Diskominfo

- Sasaran 1 Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau Tata Kelola Pemerintah
- Sasaran2 Jumlah Interkoneksi Antar SKPD dan Sekolah
- Sasaran 3 Koneksi Wifi/ Hotspot Area Publik dan Koneksi CCTV
- Sasaran 4 Rata-rata Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang di Distribusikan ke SKPD

C. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

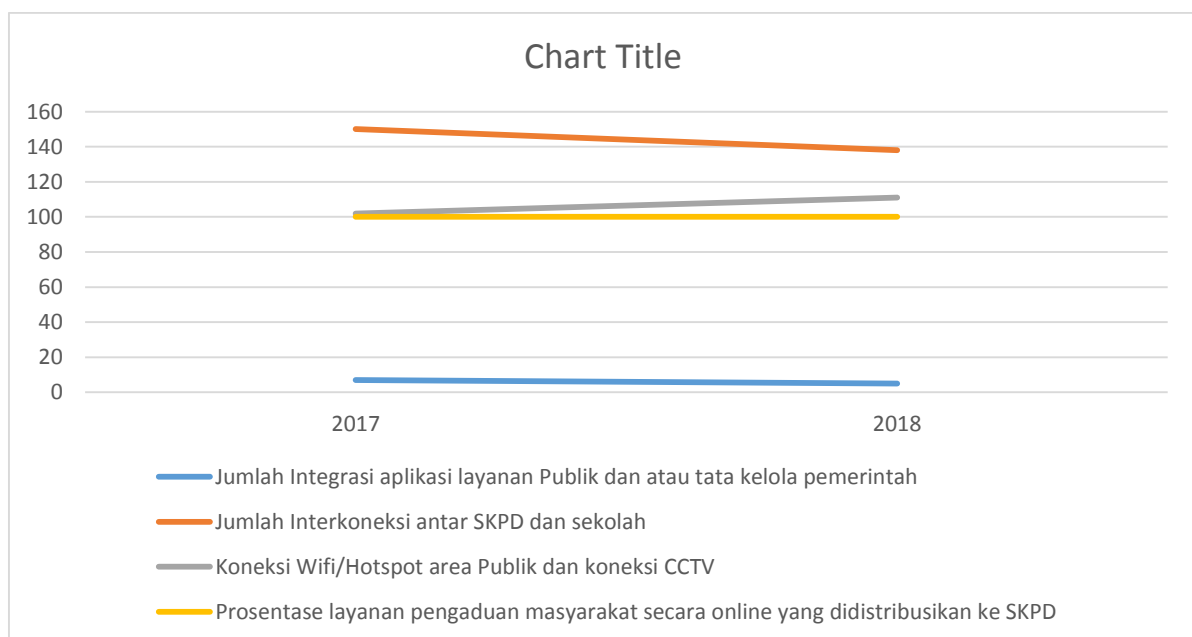
1. Target dan Analisis Target Renstra 2013-2018

Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Diskominfo Tahun 2013-2018 sebagaimana pada Tabel 3.

TABEL 3. TARGET RENSTRA 2013-2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau Tata Kelola Pemerintah	Aplikasi	-	-	-	7	5
2	Jumlah Interkoneksi Antar SKPD dan Sekolah	Lokasi	-	-	-	154	138
3	Koneksi Wifi/ Hotspot Area Publik dan Koneksi CCTV	Lokasi	-	-	-	102	111
4	Rata-rata Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang di Distribusikan ke SKPD	Hari	3	3	3	3	3

Jika target akhir pada Renstra Tahun 2018 ditafsirkan sebagai target 100% kinerja pada akhir tahun Renstra, maka kita dapat melihat peningkatan target renstra per-tahun pada Tabel 3. Di Tabel 3, terlihat 3 (tiga) indikator yang melebihi target Renstra.



GAMBAR 2. AKUMULASI PERSENTASE TARGET RENSTRA 2013-2018

Pada gambar 4 terlihat 3 (Tiga) indikator dari 4 (Empat) indikator telah melebihi target RENSTRA, dan 1 (Satu) indikator yang selalu konsisten setiap tahunnya, yaitu “Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan kepada SKPD”.

2. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

TABEL 4. KODE WARNA SKALA PENGUKURAN ORDINAL CAPAIAN KINERJA

Warna	Persentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target/ tidak dilakukan pengukuran
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Nomor: 060/163-Diskominfo Tanggal 5 Februari 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2018 ditunjukkan oleh Tabel 5

dengan baris warna kuning. Capaian kinerja Tahun 2018 ditunjukkan oleh Tabel 5 di bawah ini.

TABEL 5. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017		2018	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah	Aplikasi	7	9	5	5
2	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	Lokasi	154	168	138	145
3	Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	Lokasi	102	113	111	123
4	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	Hari	3	3	3	3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

TABEL 6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			2018		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah	Aplikasi	7	9	128,57	5	5	100
2	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	Lokasi	154	168	109	138	145	105
3	Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	Lokasi	102	113	111	111	123	111
4	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	Hari	3	3	100	3	3	100

Dari tabel 6 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU yang mencerminkan keberhasilan rata-rata di atas 100% dari target yang ditetapkan. Dalam LKIP tahun 2018, semua indikator adalah IKU (Indikator Kinerja Utama).

3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

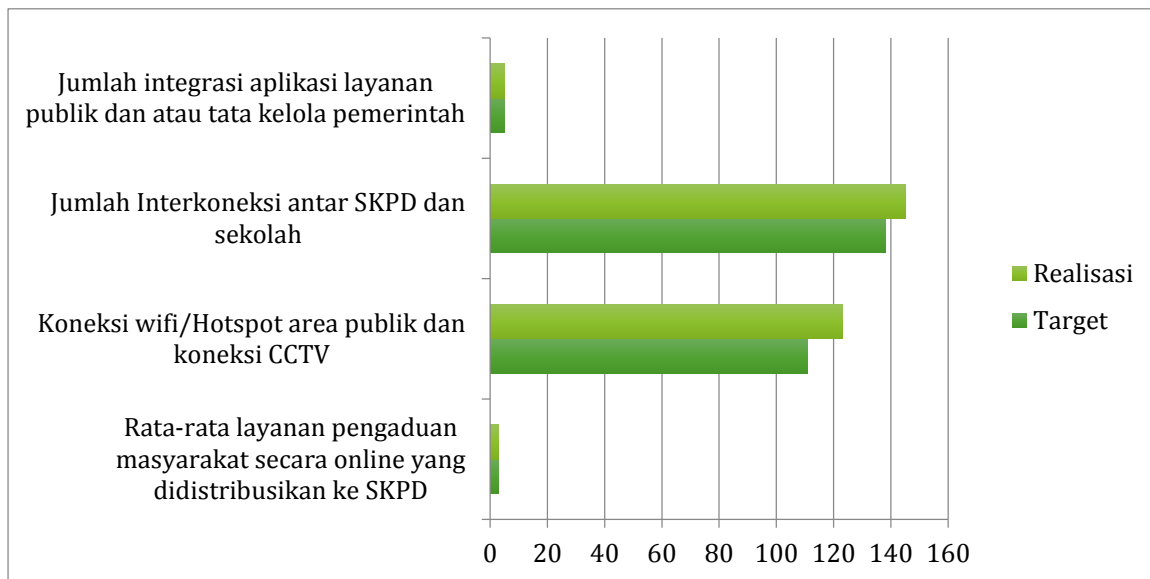
Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2013-2017 sebanyak 5 (Lima) sasaran.

Pada Tahun 2017-2018 ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 sasaran. Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah sebagai berikut:

TABEL 7. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi target (> 100)	2
2	Tercapai	2
	Jumlah	4

Gambar 3. Perbandingan persentase capaian kinerja 2018



Secara umum, terjadi peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2018, seperti ditunjukkan oleh gambar 6 di atas. Tidak ada perbedaan atau selisih pada capaian kinerja, karena 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator melebihi target yaitu, Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola, Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah serta pemerintah, dan Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV dan 1 (satu) indikator yang selalu konsisten mencapai target yaitu 100% yaitu “Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD”

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

TABEL 8. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2017, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	
			2017	2018
1	Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah	Persentase	9	5
2	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	Persentase	168	145
3	Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	Persentase	113	123
4	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	Hari	3	3

Dari tabel 8, kita dapat melihat peta capaian kinerja mulai dari capaian awal Tahun 2018 hingga Triwulan 4 Tahun 2018. Pada Tahun 2018 capaian yang tepat berwarna

hijau menunjukkan capaian yang tepat memenuhi target yang didefinisikan di Renstra Diskominfo 2013-2018, sedangkan yang berwarna biru menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target. Pada akhir 2018, terlihat jumlah sel berwarna biru, sebanyak 2 indikator, 2 indikator yang berwarna hijau (mencapai target renstra).

Dari Tabel 8 dan Tabel 9, terlihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator yang pengukurannya diulang pada setiap periode waktu tertentu. Artinya capaian kinerja sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhi capaian kinerja pada periode pengukuran berikutnya. Indikator –indikator tersebut adalah:

1. Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD

Dari Tabel 10, terlihat bahwa 100% dari 4 capaian kinerja Diskominfo telah memenuhi target yang ditetapkan di Renstra Diskominfo tahun 2013-2018. Dari keadaan ini dapat dilakukan analisa, untuk indikator-indikator tersebut sekiranya dapat dilakukan evaluasi, apakah dapat ditingkatkan, baik target maupun dilakukan perubahan indikator secara keseluruhan menjadi indikator baru yang lebih SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-bound) .

2. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2013-2018

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Renstra 2013-2018, maka data capaian dan presentase kinerja pada Tahun 2017, dan Tahun 2018, namun karena indikator Tahun 2018 ini baru jadi tidak perlu dibandingkan dengan Tahun 2017. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaiannya Renstra, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Renstra, maupun untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Bandung secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* dari SKPD, dalam hal ini, Diskominfo Kota Bandung.

TABEL9. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target	
			2017	2018	2017	2018
1	Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah	Aplikasi	9	5	7	5
2	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	Lokasi	168	145	154	138
3	Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	Lokasi	113	123	102	111
4	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	Hari	3	3	3	3

TABEL 10. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target	
			2017	2018	2017	2018
1	Jumlah Integrasi aplikasi layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah	Aplikasi	129%	100%	100%	100%
2	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	Lokasi	109%	105%	100%	100%
3	Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	Lokasi	111%	111%	100%	100%
4	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	Persentase/hari	100%	100%	100%	100%

 Sudah mencapai target RENSTRA 2013-2018

 Melebihi target RENSTRA 2013-2018

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pada bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

1. Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau Tata Kelola Pemerintah

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Pemanfaatan ICT (*Information and Communication Technology*) atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan oleh manfaat TIK yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas suatu aktifitas kegiatan. Selain itu kemajuan TIK yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Seiring dengan perkembangannya, TIK telah diimplementasikan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan yang beragam. Berbagai basis data yang berskala besar disimpan dalam bentuk elektronik dan disimpan pada tempat yang berbeda-beda. Beragam aplikasi perangkat lunak telah dibangun dan dimanfaatkan dalam suatu lingkungan jaringan komputer yang meliputi berbagai institusi termasuk pemerintah didalamnya. Perkembangan internet secara signifikan juga telah membawa pemanfaatan TIK ke tingkatan yang lebih tinggi. Melalui jaringan internet basis data, aplikasi bahkan sistem informasi terhubung satu sama lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih kompleks. *E-Gov, E-Health, E-Learning* merupakan beberapa contoh sistem informasi layanan publik yang dibangun dengan basis internet.

Namun demikian pemanfaatan yang optimal dari TIK belum sepenuhnya dapat tercapai. Salah satu penyebabnya adalah basis data dan aplikasi di-

bangun menggunakan *platform* sistem informasi dan data yang berbeda-beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum tentu dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu.

Urgensi Integrasi Sistem Informasi

Urgensi dari diperlukannya integrasi sistem informasi di Pemerintah Kota Bandung adalah:

a. Kondisi *e-Government* terkait dengan adanya pulau-pulau informasi, dimana antar institusi saling membutuhkan informasi. Sistem informasi di Pemerintah Kota Bandung banyak dikembangkan secara terpisah-pisah dan tidak terintegrasi. Sistem dikembangkan dengan teknologi yang tergantung pada berbagai macam vendor, yang semuanya merupakan teknologi tertutup, dan tidak sedikit pula yang dikembangkan tanpa menggunakan sistem *database* (*RDBMS/Relational Database Management System*), yang sangat sulit diintegrasikan dengan sistem lain. Sebagai contoh, dalam sistem *E-Government*, sistem informasi layanan publik yang dipergunakan oleh setiap SKPD pada umumnya berbeda antar satu dengan yang lainnya dan tidak dapat langsung saling berhubungan untuk menunjang suatu layanan terpadu seperti layanan pajak dan kependudukan

b. Urgensi perlunya integrasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik bagi masyarakat. Kemampuan suatu sistem atau produk untuk bekerjasama dengan suatu sistem atau produk lainnya disebut dengan interoperabilitas, dimana satu aplikasi dapat saling berkomunikasi dengan aplikasi yang lainnya. Sistem Informasi di Pemerintah Kota Bandung pun sangat perlu berinteroperabilitas, karena sebenarnya satu sistem informasi saling terkait dengan sistem informasi lainnya meskipun sistem tersebut dibangun dengan *platform* dan *database* yang berbeda. Seluruh aplikasi dan pulau-pulau informasi yang ada di seluruh Pemerintah Kota Bandung merupakan satu aset yang harus dipikirkan bersama agar bisa menjadi satu sistem terintegrasi

sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Bandung.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur integrasi aplikasi-aplikasi e-government seluruh SKPD. Dengan demikian, ukuran ideal dari indikator ini adalah jumlah aplikasi milik SKPD yang telah terintegrasi. Adapun target jumlah aplikasi yang akan diintegrasikan pada Tahun 2018 adalah 5 aplikasi dengan rincian TW1 - aplikasi, TW2 sebanyak 2 aplikasi, TW3 sebanyak 1 aplikasi (3 aplikasi) dan TW4 sebanyak 2 aplikasi (5 aplikasi). Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator 1} = \frac{\text{Jumlah aplikasi yang berhasil diintegrasikan}}{5 \text{ Aplikasi}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Pada Tahun 2018 ini dari Target 5 aplikasi sebanyak 5 aplikasi yang telah terintegrasi atau ***sesuai dengan target yang telah ditentukan.***

No	URAIAN	Rencana 2018	Realisasi 2018
1	Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau tata kelola pemerintah	5 Aplikasi	5 Aplikasi

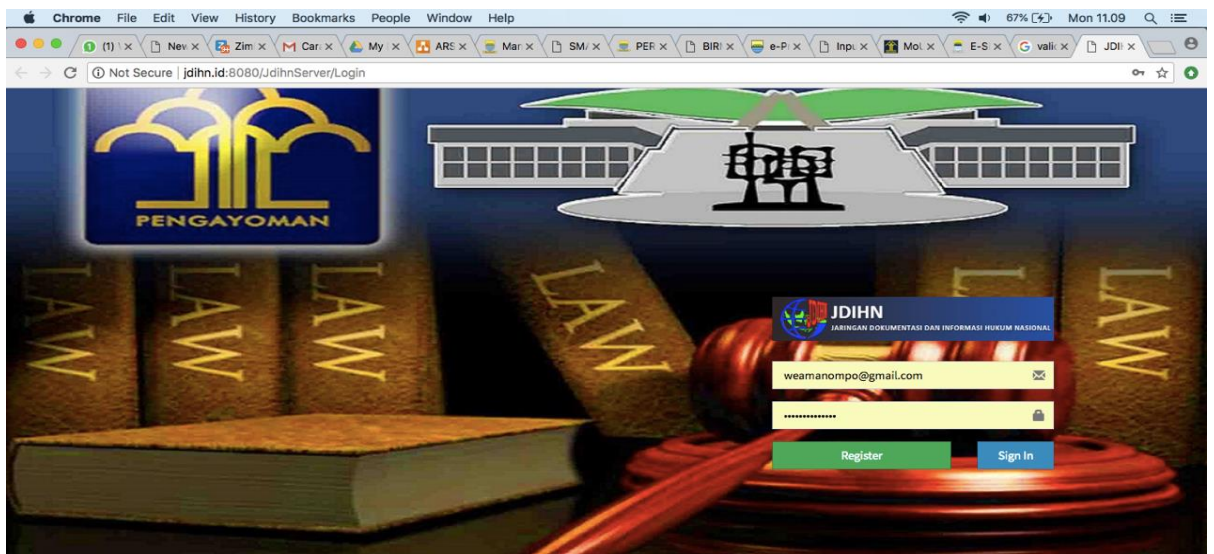
Aplikasi yang telah terintegrasi adalah :

Aplikasi yang telah terintegrasi adalah;

1. Aplikasi Silakip dan SIMDA

Triwulan1	S - 1	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government		
Triwulan2	No.	Nama Program / Kegiatan	Anggaran PK Tahun 2018	Penyerapan Tahun 2018 Triwulan 2
Triwulan3	2.10.2.10.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
Triwulan4	2.10.2.10.01.01.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	2.835.885.780	0
	2.10.2.10.01.01.15.005	Pengadaan alat studio dan komunikasi	468.562.500	0
	2.10.2.10.01.01.15.006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	13.349.025.073	0
	2.10.2.10.01.01.15.009	Pengelolaan Bandung Command Center	7.344.606.938	0
	2.15.2.10.01.01.17	Program Optimalisasi Persandian dan Aplikasi		
	2.15.2.10.01.01.17.001	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Informatika	563.694.520	156.169.500
	2.15.2.10.01.01.17.002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1.084.700.600	145.555.550
	2.15.2.10.01.01.17.003	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	773.400.000	138.229.000
	S - 2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan		

2. Aplikasi Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Kota Bandung dengan Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Nasional.



3. Aplikasi perijinan HAYU dengan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan data Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP).

Tujuan :

Melakukan validasi data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon ijin dan melakukan pengecekan apakah wajib pajak bersangkutan

telah menyampaikan laporan terkait pembayaran pajak 2 tahun terakhir ke Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI.

Cek NPWP

Data yang di Upload Pemohon

Data yang didapat dari Kantor Pajak

NPWP	: 836897640422000
Nama	: MULTI BUAH SEGAR
Alamat	: KOPO PERGUDANGAN BIZPARK, Blok B01, Nomor 51, RT 001, RW 002 KEL. CIRANGRANG KEC. BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG JAWA BARAT
KPP	: PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA
Tanggal Daftar	: 23-08-2018
Jenis WP	: BADAN

Tutup

4. Aplikasi Perijinan HAYU dengan Sistem Informasi Pembayaran PBB (SIPP)

Tujuan :

Integrasi data nomor objek pajak (NOP) dan status pembayaran dengan aplikasi SIPP (untuk validasi)

Cek NOP !!MASIH TESTING!!

NOP	: 327324000200102510
Nama	: PUPU SUHARTO W
Alamat	: SETRASARI PLAZAA-1
KPP	: 799,530
Tanggal Daftar	: Pajak belum dibayar

Tutup

5. Aplikasi Perijinan HAYU dengan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota (SIPETRUK)

Tujuan :

Integrasi data nomor Keterangan Rencana Kota (K RK) dengan aplikasi perijinan HAYU (untuk validasi).

Presentase capaian kinerja pada indikator “Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau Tata Kelola Pemerintah adalah $5/5 \times 100 = 100\%$ (sesuai Target 2018)

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2018 dari target 5 aplikasi telah terintegrasikan 5 aplikasi (Sesuai Target) bila dibandingkan dibanding dengan Tahun 2017 dari target 7 aplikasi terealisasi 9 aplikasi.

e. Output program / kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah aplikasi SKPD yang terintegrasikan. Capaian kinerja pada indikator “Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau Tata Kelola Pemerintah” 5 aplikasi Target Kinerja Tahun Anggaran 2018”.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan di 1 Program, yaitu **Program Optimalisasi Persandian dan Aplikasi**. Indikator “Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau Tata Kelola Pemerintah”, melalui kegiatan Pengembangan Aplikasi Informasi. Input dana yang digunakan sebesar Rp. 563.694.520,- sudah terealisasi sebesar Rp. 462.331.500,- atau 82,02%.

Kegiatan pada indikator “Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau Tata Kelola Pemerintah” yang menghasilkan output:

- ✓ 5 Aplikasi Terintegrasi

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2018 ini diantaranya:

- ❖ Ketersediaan Tenaga Konsultan untuk ahli database
- ❖ Ketersediaan Tenaga Konsultan untuk system analys
- ❖ Ketersediaan Tenaga Konsultan untuk Programmer
- ❖ Ketersediaan Tenaga Konsultan untuk Technical Writer

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- ❖ Pengesahan DPA yang terlambat (baru mulai bulan Maret akhir)
- ❖ Kebutuhan Integrasi dari SKPD berubah-ubah
- ❖ Source code untuk di integrasikan tidak disimpan di SKPD
- ❖ Tidak adanya dokumentasi aplikasi sehingga tim kesulitan untuk memahami aplikasi yang ada
- ❖ Ketidakteragaman penggunaan kode pada beberapa aplikasi harus di konsolidasikan dulu sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk integrasi
- ❖ Kendala Regulasi (setiap melakukan kerjasama dengan Diskominfo diharuskan dilakukan melalui MOU)

h. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Komitmen SKPD untuk membantu dalam penyediaan akses ke database agar data dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya
- ❖ Komitmen SKPD untuk menyediakan source code sehingga akan mempercepat tim dalam mengintegrasikan aplikasi

2. Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan Sekolah

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Kebutuhan koneksi internet di lingkup Pemerintah Kota Bandung meningkat seiring dengan program-program unggulan berbasis Smart City. Oleh karena itu dibutuhkan koneksi internet yang memadai bagi SKPD-SKPD untuk mendukung jalannya program-program unggulan tersebut.

Adapun kebutuhan internet di sekolah-sekolah negeri Kota Bandung sudah menjadi keharusan terlebih dengan adanya program PPDB, UNBK dan program lainnya yang membutuhkan koneksi internet memadai.

Koneksi jaringan ke SKPD, Kecamatan dan Sekolah juga bisa dimanfaatkan sebagai intranet kota sehingga pertukaran data dan informasi bisa terselenggara dengan baik.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Target yang digunakan indikator ini adalah target kualitatif berdasarkan jumlah SKPD yang terkoneksi. Jumlah SKPD/ Sekolah yang terkoneksi jaringan didapatkan dari data Diskominfo yang terdaftar dan sudah terintegrasi.

Menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 2} = \frac{\text{Jumlah SKPD / Sekolah terintegrasi}}{138 \text{ lokasi}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Capaian indikator kerja nyata terhadap indikator target Renstra Diskominfo Tahun 2018 didapat: $145 / 138 = 105\%$ (**melebihi target Renstra Diskominfo Tahun 2018**).

No	URAIAN	Target 2018	Realisasi 2018
1	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	138 lokasi	145 lokasi

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2018 telah dipasang jumlah titik Interkoneksi Antar SKPD dan Sekolah dengan kondisi sangat baik. Dan Tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan "Jumlah Interoneksi SKPD dan Sekolah" adalah indikator baru.

No	URAIAN	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah	168 lokasi	145 lokasi

- e. Output program / kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja

Capaian kinerja pada indikator “Jumlah Interoneksi SKPD dan Sekolah” telah **berhasil memenuhi target kinerja** yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada Tahun 2018.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan di 1 Program, yaitu Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK dengan input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja Sebesar Rp.3.340.530.000,- di Triwulan 4 tahun 2018 ini realisasi anggaran sebesar Rp. 3.283.687.895,- (98,29%).

Menghasilkan output;

- i. Koneksi SKPD yang terpasang : 88 PD termasuk Kecamatan dengan koneksi seluruhnya FO/VPN.
- ii. Koneksi Sekolah yang terpasang : 57 Sekolah SMP Negeri.

DAFTAR JARINGAN INTERNET OPD 2018

NO	SKPD	ALAMAT	KONEKSI
BADAN DAERAH			
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
DINAS DAERAH			
1	Dinas Pendidikan	Jl. A.Yani No. 239	FO/VPN

2	Dinas Kesehatan	Jl. Supratman No. 23	FO/VPN
3	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Cianjur No.34	FO/VPN
4	Dinas Penataan Ruang	Jl. Cianjur No.34	FO/VPN
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	JL. Caringin	FO/VPN
6	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jl. Sindang sirna no 40	FO/VPN
7	Dinas Tenaga Kerja	Jl. RE. Martanegara No. 4	FO/VPN
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat	JL. Seram No. 2	FO/VPN
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Jl. Maskumambang No. 4	FO/VPN
10	Dinas Pangan dan Pertanian	Jl. Arjuna No.45	FO/VPN
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	JL. Sadang Tengah No. 4 & 6	FO/VPN
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Ambon No.1	FO/VPN
13	Dinas Perhubungan	Jl. Soekarno Hatta No 205	FO/VPN
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jl. Kawalayaan No. 2	FO/VPN
16	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Jl. Kawalayaan No. 2	FO/VPN
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jl. Cianjur No.34	FO/VPN
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	JL. Taman Sari No. 76	FO/VPN
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	JL. Ahmad Yani No. 227	FO/VPN
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Seram No.2	FO/VPN
21	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Jl. Sukabumi No.17	FO/VPN
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Martanegara No 4	FO/VPN
I. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
1	Bagian	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN

	Pemerintahan		
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
3	Bagian Hukum	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
4	Bagian Kerjasama	Jl. Aceh No.	FO/VPN
II. ASISTEN PEREKENOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
1	Bagian Perekonomian	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
2	Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
III. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
		KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
1	Bagian Umum dan Keuangan	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
2	Bagian ORPAD	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
3	Bagian Humas dan Protokol	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
4	Bagian TU dan Kepegawaian	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
PERUSAHAAN DAERAH			
1	PD. BPR	Jl. Naripan No.29	FO/VPN
2	PDAM TIRTA WENING	Jl. Badak Singa No. 10	FO/VPN
3	PD. Kebersihan	Jl. Surapati No. 126	FO/VPN
4	PD. Pasar Bermartabat	Jl. Jurang No. 1	FO/VPN
1	SEKRETARIAT DPRD	Jl. Sukabumi No. 30	FO/VPN
2	INSPEKTORAT	Jl. Tera No. 20	FO/VPN
3	STAFF AHLI	JL. Aceh	FO/VPN
4	SEKRETARIAT DAERAH	KOMPLEK BALAIKOTA	FO/VPN
5	PENDOPO	JL. DALEM KAUM	FO/VPN
6	RUMAH DINAS SEKDA	JL. Nyland	FO/VPN
7	RUMAH DINAS WAKIL WALIKOTA	JL. Nyland	FO/VPN
8	UPT RADIO SONATA	TAMAN PRAMUKA	FO/VPN
9	GEDUNG KORPRI	JL. CICENDO	FO/VPN
10	GEDUNG PKK	Jl. Sukabumi	FO/VPN
RUMAH SAKIT			
1	RSUD	Jl. Rumah Sakit No. 22	FO/VPN
2	RSKIA	Jl. Astana Anyar No. 224	FO/VPN
3	RSKGM	Jl. LL.R.E Martadinata	FO/VPN
KECAMATAN			

1	Kecamatan Sukasari	JL. Gegerkalong Hilir No. 155	FO/VPN
2	Kecamatan Sukajadi	JL. Sukamulya No.4	FO/VPN
3	Kecamatan Cicendo	JL. Purabaya No.1	FO/VPN
4	Kecamatan Andir	JL. Srigunting Raya No.1	FO/VPN
5	Kecamatan Cidadap	JL. Hegarmanah Tengah No.1	FO/VPN
6	Kecamatan Coblong	JL. Sangkuriang No. 10a	FO/VPN
7	Kecamatan Bandung Wetan	JL. Taman Sari No.49	FO/VPN
8	Kecamatan Sumur Bandung	JL. Lombok No.6	FO/VPN
9	Kecamatan Cibeunying Kaler	Jalan Raya Cigadung Selatan Nomor 100 C	FO/VPN
10	Kecamatan Cibeunying Kidul	JL. Sukasenang No.11	FO/VPN
11	Kecamatan Astanaanyar	JL. Bojongloa No.69	FO/VPN
12	Kecamatan Bojongloa Kaler	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 258	FO/VPN
13	Kecamatan Babakan Ciparay	JL. Babakan Ciparay No. 212	FO/VPN
14	Kecamatan Bojongloa Kidul	JL. Leuwi Panjang / Kebon Lega	FO/VPN
15	Kecamatan Bandung Kulon	JL. Holis No.210/191 A	FO/VPN
16	Kecamatan Regol	JL. Denki No. 54	FO/VPN
17	Kecamatan Lengkong	JL. Talaga Bodas No.35	FO/VPN
18	Kecamatan Batununggal	JL. Venus No. 6	FO/VPN
19	Kecamatan Kiaracondong	JL. Babakan Sari No. 117	FO/VPN
20	Kecamatan Arcamanik	JL. Cisaranten Kulon	FO/VPN
21	Kecamatan Cibiru	JL. Manisi No.13	FO/VPN
22	Kecamatan Antapani	JL. A H Nasution No. 14	FO/VPN
23	Kecamatan Ujung Berung	JL. Alun - Alun Utara No. 211	FO/VPN
24	Kecamatan Rancasari	JL. Santosa Asih No.17	FO/VPN
25	Kecamatan Buah Batu	JL. Cijawura Hilir No. 64	FO/VPN
26	Kecamatan Bandung Kidul	JL. Batununggal No.3	FO/VPN
27	Kecamatan Panyileukan	Jl. Soekarno Hatta KM 12,5	FO/VPN
28	Kecamatan Gedebage	Jl. Gedebage Selatan No.292	FO/VPN
29	Kecamatan Mandalajati		FO/VPN
30	Kecamatan Cinambo	Jl. Cinambo No.56	FO/VPN

DAFTAR LAYANAN INTERNET SEKOLAH DISKOMINFO 2018

No	NPSN	Sekolah	Alamat	Telp	Kelurahan/ Kecamatan
1	20219337	SMP NEGERI 1	Jl.Ksatriaan No.12	6011429	Arjuna
2	20219332	SMP NEGERI 10	Jl. Rd. Dewi Sartika No.115	5210133	Pungkur
3	20219331	SMP NEGERI 11	Jl. H. Samsudin No.34	022-5200816	Ciateul
4	20219330	SMP NEGERI 12	Jl. Dr. Setiabudhi No. 195	022-2013947	Gegerkalon g
5	20219339	SMP NEGERI 13	Jl. Mutiara No.15	022-7305062	Turangga
6	20219340	SMP NEGERI 14	Jl. Lapangan Supratman No.8	022-7272064	Cihapit
7	20219341	SMP NEGERI 15	Jl. Setiabudi No. 89	222034914	Gegerkalon g
8	20219351	SMP NEGERI 16	Jl. Phh. Mustopa 53	022-7275281	Neglasari
9	20219350	SMP NEGERI 17	Jl. Pacuan Kuda Arcamanik	022-7275986	Sukamiskin
10	20219349	SMP NEGERI 18	Jl. SMP No 5-6 Terusan Kiaracandong	(022) 756633	Margasari
11	20219348	SMP NEGERI 19	Jl. Sadang Luhur XI	222500657	Sekeloa
12	20219347	SMP NEGERI 2	Jl. Sumatera No.42	224204155	Merdeka
13	20219344	SMP NEGERI 20	Jl. Centeh No. 5	227302884	Samoja
14	20219343	SMP NEGERI 21	Jl. Caringin Gg. Lumbung II	022-5402000	Babakan Ciparay
15	20219342	SMP NEGERI 22	Jl. Wr Supratman No. 24 Bandung	227271182	Sukamaju
16	20219328	SMP NEGERI 23	Jl. Arjuna No. 20-22	022-6011128	Ciroyom
17	20219410	SMP NEGERI 24	Jl. Sukamulya No.33	022-6015090	Suka Asih
18	20219409	SMP NEGERI 25	Pajagalan	022-4265907	Nyengseret
19	20219408	SMP NEGERI 26	Jl. Perumnas Sarijadi Blok 23	2012277	Sukawarna
20	20219407	SMP NEGERI 27	Jl. Yudhawastu Pramuka I	022-7101246	Cicadas
21	20219406	SMP NEGERI 28	Jl. Solontongan II Buahbatu	227304544	Turangga
22	20219405	SMP NEGERI 29	Jl. Geger Arum no. 11 A	022-2012579	Isola
23	20219404	SMP NEGERI 3	Jl. Rd. Dewi Sartika No. 96	022-5207378	Pungkur
24	20219411	SMP NEGERI 30	Jl. Sekejati No.23	022-7305150	Sukapura
25	20219412	SMP	Jl. Binong Jati No. 139	022-7337017	Binong

		NEGERI 31			
26	20219413	SMP NEGERI 32	Jl Arjuna No 18 Bandung	022 6072410	Ciroyom
27	20219422	SMP NEGERI 33	Jl. Babakan Tarogong	226035940	Babakan Tarogong
28	20219421	SMP NEGERI 34	Jl. Waas Soekarno Hatta	227565790	Batunungga I
29	20219420	SMP NEGERI 35	Jl. Dago Pojok No. 12 Bandung	222505332	Dago
30	20219419	SMP NEGERI 36	Jl. Caringin	(022)6078507	Babakan
31	20219418	SMP NEGERI 37	Jl. Babakan Sari Kiaracondong Bandung	022-7101104	Babakan Sari
32	20251907	SMP NEGERI 38	Jl. Borobudur Cibaduyut RT 03 RW 04	022 -5408978	Cibaduyut Kidul
33	20219417	SMP NEGERI 39	Jl. Holis No.439	022-5406684	Babakan
34	20219416	SMP NEGERI 4	Jl. Samoja No. 5	022-7312394	Samoja
35	20219401	SMP NEGERI 40	Jl. Wastukencana No. 75 A	022-4239058	Taman Sari
36	20219400	SMP NEGERI 41	Jl. Arjuna No. 18	022-6015864	Ciroyom
37	20219399	SMP NEGERI 42	Jl. Manjahlega Bandung	022-7565864	Margasari
38	20219386	SMP NEGERI 43	Jl. Kautamaan Istri No.31	224234863	Balong Gede
39	20219385	SMP NEGERI 44	Jl. Cimanuk No.1	022-4205409	Citarum
40	20219384	SMP NEGERI 45	Jl. Yogyakarta Antapani Bandung	022-7277721	Antapani Kidul
41	20219383	SMP NEGERI 46	Jl. Cigagak	022-7807214	Cipadung
42	20219382	SMP NEGERI 47	Jl. Budi Cilember No. 19 B	226652284	Sukaraja
43	20219381	SMP NEGERI 48	Bandung	022-7560480	Mekarjaya
44	20219380	SMP NEGERI 49	Jl. Antapani No. 58	022-7275285	Antapani Kulon
45	20219379	SMP NEGERI 5	Jl. Sumatra No. 40	022-4207121	Merdeka
46	20219378	SMP NEGERI 50	Jl. Pasirjati No. 12	022- 7800874	Cigending
47	20219388	SMP NEGERI 51	Jl.Derwati	022-7563831	Derwati
48	20219389	SMP NEGERI 52	Jl. Bukit Raya Ciumbuleuit	022-2034769	Ciumbuleuit
49	69775307	SMP NEGERI 53	JL. ARCAMANIK NO 10 SINDANGLAYA	227812698	Kec. Mandalajati
50	69894966	SMP NEGERI 54	Jl. Raya Utsman Bin Affan		Rancanump ang
51	69963624	SMP NEGERI 55	Jl. Batu Rengat RT. 04/01	8561391576	Cigondewa h Kaler

52	69963625	SMP NEGERI 56	Jl. Pasanggrahan IX RT.04/10	(022) 63727844	Cipadung Kulon
53	69963626	SMP NEGERI 57	Jl. Gempol Sari No. 142 RT.05/09	(022) 63001069	Gempol Sari
54	20219398	SMP NEGERI 6	Jl. H. Yakub No. 36	(022) 85880151	Kebon Jeruk
55	20219397	SMP NEGERI 7	Jl. Ambon No. 23	022-4233470	Citarum
56	20219396	SMP NEGERI 8	Jl. ALUN-ALUN UTARA NO.211B UJUNGBERUNG	227800098	Cigending
57	20219394	SMP NEGERI 9	Jl. Semar No. 5 Bandung	022 6014886	Arjuna

Pemeliharaan dan pemasangan jaringan internet



f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2018 ini diantaranya:

- ❖ Seluruh SKPD, Kecamatan dan sekolah sudah tercover koneksi FO
- ❖ Adanya system monitoring realtime kondisi perangkat jaringan di lokasi SKPD untuk memudahkan proses penguraian masalah

- ❖ Eskalasi penyelesaian gangguan koneksi SKPD kurang dari 1 x 24 jam (tergantung jenis gangguan)
- ❖ Pelaporan gangguan koneksi SKPD realtime melalui email
- ❖ Sekolah terkoneksi langsung pada system PPDB.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor penghambat diantaranya :

- ❖ Kurang SDM di PD/Kecamatan yang mengerti jaringan untuk dijadikan PIC jika terjadi permasalahan jaringan
- ❖ Kurangnya sosialisasi akan manfaat dari interkoneksi SKPD dan Sekolah berakibat pada masing-masing SKPD dan Sekolah mengganggu belanja internet.

h. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Melakukan kunjungan terjadwal untuk PD/Kecamatan yang minim SDM IT
- ❖ Sosialisasi keberadaan koneksi SKPD dan Sekolah untuk digunakan sebagai koneksi utama.

3. Koneksi wifi/ hotspot Area Publik dan Koneksi CCTV

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Maraknya penggunaan internet sebagai fasilitas untuk bekerja, bersosialisasi, dan hiburan telah menjangkau berbagai kalangan, dan angka penetrasi dan literasi Internet kian menaik seiring mudah dan murah akses terhadap Internet. Begitupun kebutuhan masyarakat

akan informasi lalu lintas, ketertiban dan keamanan yang disajikan dalam bentuk visual berbanding lurus dengan tingginya mobilitas masyarakat dalam setiap harinya yang membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Wifi yang terhubung dengan koneksi Internet merupakan media dasar komunikasi yang populer saat ini. Fasilitas umum disini meliputi taman dan area publik, pusat transportasi, dan tempat ibadah. Bandung menuju Smart City mengamanahkan interaksi dan turut serta warga dalam pembangunan kota. Pembangunan titik-titik wifi ini membantu mewujudkan konektivitas, baik antar warga, dan warga dengan pemerintah. CCTV yang merupakan salah satu media untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan, kriminal dan pelanggaran ketertiban. Titik tersebut ditentukan berdasarkan informasi dari masyarakat ataupun aparat terkait. Dengan adanya koneksi CCTV yang mencukupi diharapkan informasi yang diterima masyarakat dapat terselenggara dengan cepat, tepat dan efisien.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Indikator kinerja dihitung berdasarkan lokasi terpasang Wifi/ hotspot dan CCTV yang aktif terkoneksi dengan Internet, dengan target pemasangan yaitu 111 titik Wifi/ hotspot dan CCTV di Kota Bandung, menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 3} = \frac{\text{Jumlah fasum terpasang wifi dan cctv}}{111 \text{ lokasi}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Pada Triwulan 4 Tahun 2018, Untuk capaian indikator “Jumlah Interkoneksi SKPD dan Sekolah” dibandingkan dengan rencana kerja, didapat: $111/123 = 111\%$ (**Melebihi target Renstra Diskominfo Triwulan 3 tahun 2018**).

Untuk Tahun 2018 ini targetnya adalah jumlah koneksi wifi/hospot area publik dan koneksi CCTV dengan kondisi baik.

No	URAIAN	Target 2018	Realisasi 2018
1	Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	111 lokasi	123 Lokasi

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada Tahun 2018 telah dipasang jumlah titik Interkoneksi Antar SKPD dan Sekolah dengan kondisi sangat baik yaitu realisasi 123 lokasi, bila dibandingkan dengan Tahun 2017 realisasi sebesar 113 lokasi .

No	URAIAN	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV	113 Lokasi	123 Lokasi

e. Output program / kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini Jumlah titik interkoneksi wifi area publik kondisi baik. Capaian kinerja pada indikator “Koneksi Wifi/Hotspot area Publik dan koneksi CCTV” telah berhasil memenuhi target kinerja yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada Tahun 2018.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan di 1 Program, yaitu Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK dengan input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja Sebesar Rp.4.421.250.000,- di Triwulan 4 realisasi sebesar Rp. 4.421.250.000,- (100%).

Menghasilkan Output;

JUMLAH WIFI TAMAN : WIFI BANDUNG
JUARA

No	Nama	Jml Wifi	Latitude	Longitude
1	Taman Flexi	3	-6.91086151	107.6036887
2	Taman Cibeunying Park	4	-6.904695	107.62426
3	Masjid PUSDAI	5	-6.900751	107.625905
4	Taman Anggrek Superhero	4	-6.91091	107.630526
5	Taman Cempaka	4	-6.913523	107.627195
6	Taman Supratman	3	-6.907006	107.630131
7	Taman Pramuka	8	-6.909598	107.626625
8	Taman Musik Centrum	6	-6.911968	107.616076
9	Taman Teuku Umar	3	-7.033	110.41665
10	Masjid Salman ITB	4	-6.893686	107.611218
11	Taman Bima	3	-6.907931	107.591396
12	RSUD Kota Bandung	4	-6.915681	107.69883
13	Lapang Gasmin Antapani	3	-6.91696	107.66145
14	Taman 3G	2	-6.921728	107.676596
15	Masjid Istiqomah	4	-6.944807	107.595419
16	Ponpes Daaruttaubah	3	-6.917862	107.59697
17	Taman Film	4	-6.898687	107.607745
Total		67		

No	Nama	Jml Wifi	Latitude	Longitude
1	Taman Pustaka Bunga	5	-6.903427	107.622906
2	Museum Sri Baduga	3	-6.937765	107.603462
3	Balai Pertemuan Ridwan Kamil	2	-6.937765	107.603462
4	Taman Panatayuda	2	-6.897994	107.615886
5	Masjid Al-Jihad	3	-6.896939	107.581641
6	Masjid Al-Adla	3	-6.90798	107.627891
7	Masjid Al-Hikmah	2	-6.881857	107.608352
8	Masjid Raya Cipaganti	4	-6.894603	107.602287
9	Ponpes Daarut Tauhiid Bandung	4	-6.864246	107.589841
10	Taman Restorasi Sungai Cikapayang	3	-6.898681	107.612468
11	Masjid Al Ukhuwah	4	-6.910801	107.608677
12	Masjid Raya Ujung berung	4	-6.913797	107.700858
13	Masjid besar Miftahul Manan	2	-6.90317	107.656068
14	Masjid Al-Hidayah	3	-6.930695	107.623813
15	Masjid Al Manar	3	-6.897868	107.622282

16	Masjid Agung Buah Batu	5	-6.954448	107.639855
17	Gereja HKI Jemaat Dame	2	-6.943717	107.648635
18	Masjid Mujahidin	3	-6.930478	107.619081
19	Taman Pendopo Walikota	2	-6.923455	107.606997
20	Museum Asia Afrika	4	-6.921213	107.609515
21	Ponpes Al Munawarah	2	-6.94208	107.691855
22	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	4	-6.916435	107.633665
23	Balai Kota Bandung	6	-6.912966	-6.912966
24	Taman Diskamtam	3	-6.907782	-6.907782
25	Taman Sejarah	2	-6.910097	-6.910097
Total		80		

No	Nama	Jml Wifi	Latitude	Longitude
1	Taman Lansia	2	-6.90165	107.620514
2	Pet Park	1	-6.904943	107.626769
3	Taman Tegalega	2	-6.934535	107.604845
4	Cikapundung River Spot	3	-6.920092	107.608846
5	Taman Vanda	1	-6.914021	107.610187
6	Taman Alun - Alun Ujung Berung	2	-6.913715	107.70152
7	Taman Monumen Perjuangan Rakyat	2	-6.893465	107.618538
8	Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani	4	-6.911068	107.613487
9	Terminal Leuwipanjang	4	-6.945327	107.592921
10	Terminal Cicaheum	3	-6.902611	107.654862
11	Taman Alun - Alun Bandung	4	-6.921927	107.607055
12	Taman Pasupati/Taman Jomblo	4	-6.89811	107.609254
13	Teras Cikapundung	3	-6.884473	107.60709
		35		

LOKASI TITIK CCTV DISKOMINFO

NO	Titik Lokasi	Id Pel Pln Terdekat	LATITUDE	LONGITUDE
1	Batas Kota	Bandung Barat	-6.910573	107.569273
2	Kebon Kawung - Paskal	Bandung Barat / 14004769338	-6.912358	-6.912358
3	Cicendo - kb kawung	Bandung Barat / 32113099132	-6.912707	107.60396
4	Pasar Pagarsih	Bandung Barat	-6.922584	107.592571
5	Taman Sari-Dayang Sumbi	Bandung Utara	-6.887389	107.611412
6	TAMAN SARI WS	Bandung Utara	-6.900525	107.609357
7	ITB Kebun Binatang	Bandung Utara	-6.893867	107.608454

8	Sukajadi-Setiabudhi	Bandung Utara	-6.878198	107.597821
9	Jl. Surya Sumantri	Bandung Utara	-6.882385	107.581539
10	Jl. Sutami	Bandung Utara	-6.880703	107.578661
11	Jl. Surapati - Gasibu	Bandung Utara / 4015942	-6.898899	107.616002
12	Taman Sumbersari	Rayon KOPO	-6.932122	107.576374
13	KOPO BizPark / Dpn BRI Kopo	Rayon KOPO	-6.951227	107.585942
14	Depan Toko Indra (Alun2)	Rayon Selatan	-6.921128	107.606552
15	ITC kebon Kalapa	Rayon Selatan / 32108408728	-6.927394	107.605738
16	Jl. Arcamanik	Bandung Timur	-6.904945	107.673101
17	Jl. Turangga	Bandung Timur	-6.929088	107.635544
18	Jl. Anggrek	Bandung Timur	-6.909711	107.632042
19	Katamso	Bandung Timur / 1216834	-6.903044	107.633035
20	Jl. Cihapit	Bandung Timur / 535639432189	-6.909156	107.621112
21	Pusdai	Bandung Timur /130447985	-6.901174	107.625363
22	Pasar Kosambi	Bandung Timur 1954179	-6.919720	107.622499
23	Jalaprang	Bandung Timur/ 1216834	-6.898527	107.631864
24	Taman Pramuka	Bandung Timur/ 14237084034	-6.910142	107.626063
25	Yani - Laswi	Bandung Timur/ 535639268724	-6.918676	107.631394

JARINGAN CCTV DISKOMINFO

jumlah 43

PENGADAAN	NO	LOKASI	Camera	LATITUDE	LONGITUDE
MOBOTIK CAMERA	1	A. Yani	A. Yani - Supratman 01	-6.913483	107.634377
	2	Braga	Braga 01	-6.916200	107.609051
	3	Cendana	Cendana 01	-6.909322	107.627686
	4	Dalem kaum	Dalem Kaum 01	-6.922317	107.606228
	5	Husein	Husein 01	-6.906791	107.587603
	6	Jl. Jakarta	Jl. Jakarta 01	-6.913799	107.643679
	7	Cikawao	Karapitan - Cikawao 01	-6.928698	107.616431
	8	Laswi Gatsu	Laswi - Gatot Subroto 01	-6.924284	107.627570
	9	Merdeka Aceh	Merdeka-Aceh 01	-6.909785	107.610550
	10	Merdeka Jawa	Merdeka - Jawa 01	-6.913623	107.610419
	11	BKR	Moch Toha - BKR 01	-6.937549	107.606267
	12	Inhoftank	Moch Toha - Inhoftank 01	-6.937248	107.603039

	13	Peta	Peta - Pasar Burung 01	-6.926868	107.585472
	14	Riau Banda	Riau - Banda 01	-6.906076	107.616864
	15	Gerlong	Setiabudhi - Gerlong 01	-6.864773	107.594244
	16	Buah Batu	Soekarno Hatta - Buah Batu 01	-6.948019	107.633248
	17	Soeta Kircon	Soekarno Hatta - Kiara Condong 01	-6.945341	107.641785
	18	Suniaraja	Suniaraja 01	-6.915771	107.604414
	19	Simpang IP	Simpangan IP 01	-6.906372	107.597659
DAHUA CAMERA	20	Alun alun	Alun Alun 01	-6.923347	107.606226
	21	Kordon	Bubat Kordon 01	-6.954143	107.640162
	22	Ciateul	Ciateul 01	-6.931781	107.606730
	23	Cicabe	Cicabe 01	-6.902297	107.659614
	24	Gateway	Cicadas Gateway 01	-6.907154	107.646199
	25	Cihampelas	Cihampelas 01	-6.900462	107.604255
	26	Cimindi Jembatan	Cimindi Jembatan 01	-6.896405	107.560650
	27	Cimindi Kharisma	Cimindi - Kharisma 01	-6.899308	107.562477
	28	Cimindi Sukaraja	Cimindi Sukaraja 01	-6.895404	107.560235
	29	Dago	Dago 01	-6.885117	107.613674
	30	Gasibu	Gasibu 01	-6.899216	107.619543
	31	Gedebage	GedeBage 01	-6.941058	107.691891
	32	Jakarta Borma	Jakarta - Borma 01	-6.912964	107.649430
	33	Jakarta HKBP	Jakarta - HKBP 01	-6.914577	107.635508
	34	Jamika	Jamika 01	-6.920282	107.586254
	35	Katamso	Katamso 01	-6.897708	107.634135
	36	Kebon Kopi	Kebon Kopi - Bandung 01	-6.904820	107.565701
	37	Kircon	Kircon 01	-6.918713	107.644202
	38	Pasteur	Pasteur - Paoepati 01	-6.900444	107.597944
	39	Polsek Uber	Polsek Uber 01	-6.917402	107.706066
	40	Sudirma Kemenag	Sudirman - Kemenag 01	-6.917591	107.576705
	41	Surapati core	Surapati Core 01	-6.901857	107.652617
	42	Tegalega	Tegalega 01	-6.933625	107.603273
	43	Sukajadi-Hasan Sadikin		-6.89697	107.597289

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2018 ini diantaranya:

- ❖ Tersedianya jaringan listrik ke lokasi fasilitas umum dan titik cctv
- ❖ Izin Instalasi perangkat di fasilitas umum
- ❖ Adanya system monitoring realtime kondisi perangkat wifi di lapangan
- ❖ Eskalasi penyelesaian gangguan koneksi wifi kurang dari 1 x 24 jam (tergantung jenis gangguan)
- ❖ Pelaporan gangguan koneksi wifi realtime melalui email
- ❖ Sistem pengelolaan perangkat wifi terpadu pada aplikasi dashboard

g. Faktor-faktor pendukung penghambat kinerja sasaran

Beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja pada Tahun 2018 diantaranya:

- ❖ Ijin instalasi tidak diberikan di tempat-tempat tertentu
- ❖ Tidak bisa digunakannya jaringan listrik dari Penerangan Jalan Umum (terdapat beberapa kasus)
- ❖ Tidak diberikannya akses jaringan listrik di salah satu lokasi
- ❖ Izin Instalasi tidak diberikan karena lokasi sedang dalam tahap pembangunan
- ❖ Sering terjadi putusnya kabel udara FO dari koneksi CCTV dikarenakan pembangunan atau terganggu oleh kendaraan
- ❖ Adanya aksi vandalisme pada perangkat-perangkat pendukung cctv

h. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Tidak dipasangnya wifi pada lokasi tersebut dan dilakukan pemilihan lokasi baru
- ❖ Melakukan koordinasi dengan Dinas PU
- ❖ Tidak dipasangnya wifi pada lokasi tersebut dan dilakukan pemilihan lokasi baru

- ❖ Tidak dipasangnya wifi pada lokasi tersebut dan dilakukan pemilihan lokasi baru
- ❖ Mengalihkan jalur kabel yang rawan ke jalur yang lebih aman (contoh jalur ducting)
- ❖ Memindahkan posisi box perangkat pendukung ke tempat lebih aman

4. Rata-rata Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang di distribusikan ke SKPD

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Layanan pengaduan masyarakat secara online dikelola secara langsung oleh UPT Pusat Manajemen Informasi Pemerintahan menggunakan aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat) yang terhubung ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah dan Kecamatan. Secara teknis, setiap laporan yang masuk ke dalam sistem LAPOR! Selanjutnya didistribusikan ke OPD/PD/Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan objek permasalahan yang dilaporkan dimana setiap pengaduan yang masuk tersebut harus segera didistribusikan setelah melewati proses verifikasi oleh admin LAPOR! Di Diskominfo.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Pengukuran capaian indikator 4 dilakukan dengan melihat data total jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti tepat waktu yang masuk ke LAPOR dibandingkan dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke LAPOR. Dengan menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 4} = \frac{\text{Jumlah laporan yang ditindaklanjuti tepat waktu (3 hari)}}{\text{Jumlah laporan yang masuk}} \times 100\%$$

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Jumlah laporan yang diterima oleh UPT lapor selama Tahun 2018 adalah:

No	URAIAN	Rencana 2018	Realisasi 2018
1	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	3 hari	3 hari (100%)

Total laporan pada Tahun 2018 ini adalah : 4.851 laporan, dan seluruh laporan telah ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian indikator “Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke Perangkat Daerah” adalah: $1.515/1.515 =$ selama 3 hari atau 100% (**Tepat mencapai target Tahun 2018**).

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Capaian kinerja pada Tahun 2018 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2017, dengan indikator yang hampir sama menunjukkan **konsistensi kinerja** dalam menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan capaian kinerja 100% dibandingkan dengan 100%.

No	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	3 hari (100%)	3 hari (100%)

e. Output program / kegiatan / anggaran serta pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja

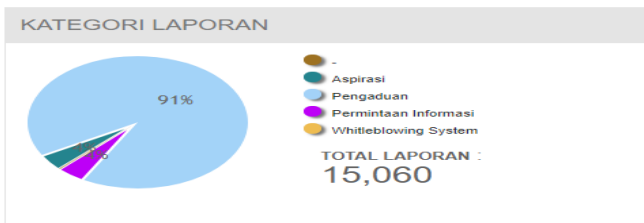
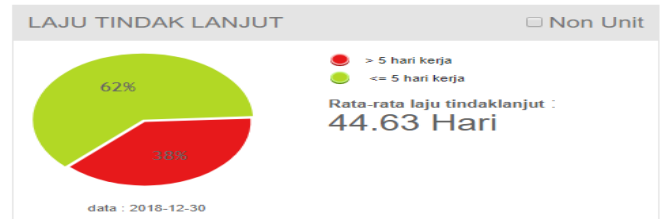
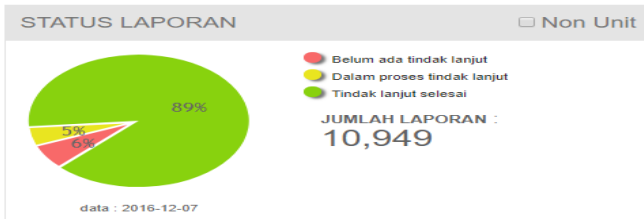
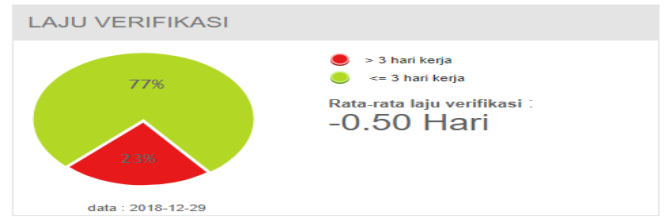
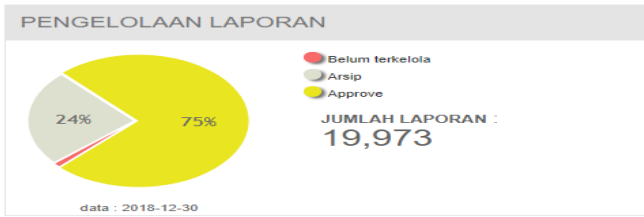
Rata-rata lama hari tindak lanjut penyaluran pengaduan masyarakat adalah selama 3 (tiga) hari. Jumlah layanan pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR pada Tahun 2018 sebanyak 4.851 Pengaduan yang masuk dan telah distribusikan ke masing-masing Perangkat Daerah. Output dari indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang di distribusikan ke SKPD” ini adalah:

- ✓ Tertanganinya Pengaduan Masyarakat secara cepat, tepat dan tuntas
- ✓ Terjalannya Komunikasi dua arah antara Pemerintah dan Masyarakat
- ✓ Terjalannya hubungan kerjasama dalam manuntaskan permasalahan-permasalahan kota
- ✓ Tersampainya program-program Pemerintah kepada Masyarakat.

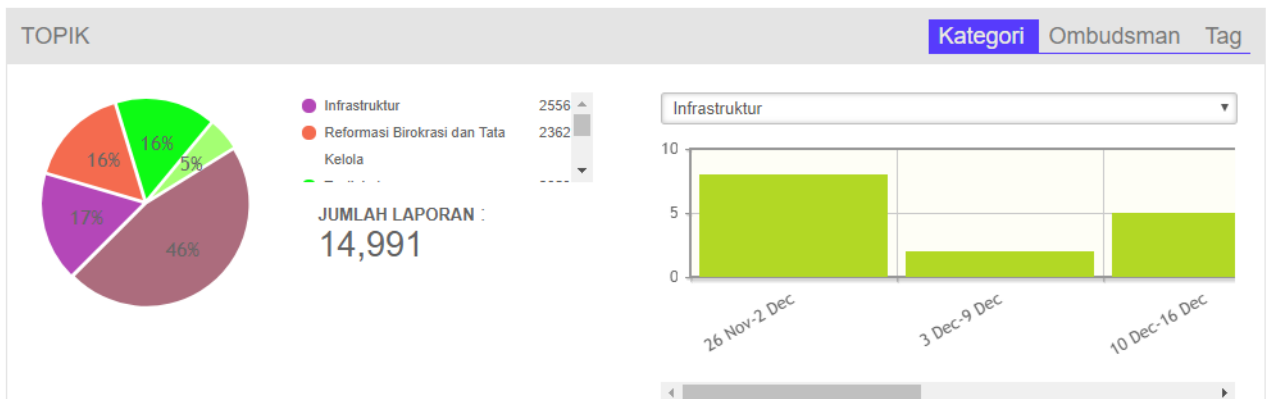
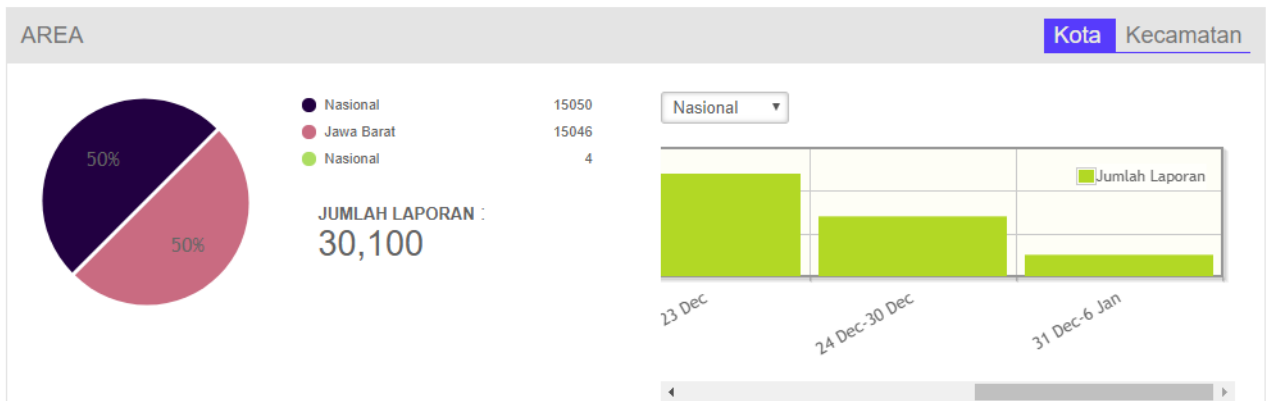
Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang di distribusikan ke Perangkat Daerah menggunakan mata anggaran **Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi**, melalui kegiatan **Pengelolaan Pusat Manajemen Informasi Pemerintah** yang dianggarkan sebesar Rp 3.406.307.450, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.055.328.530,- (89,70).

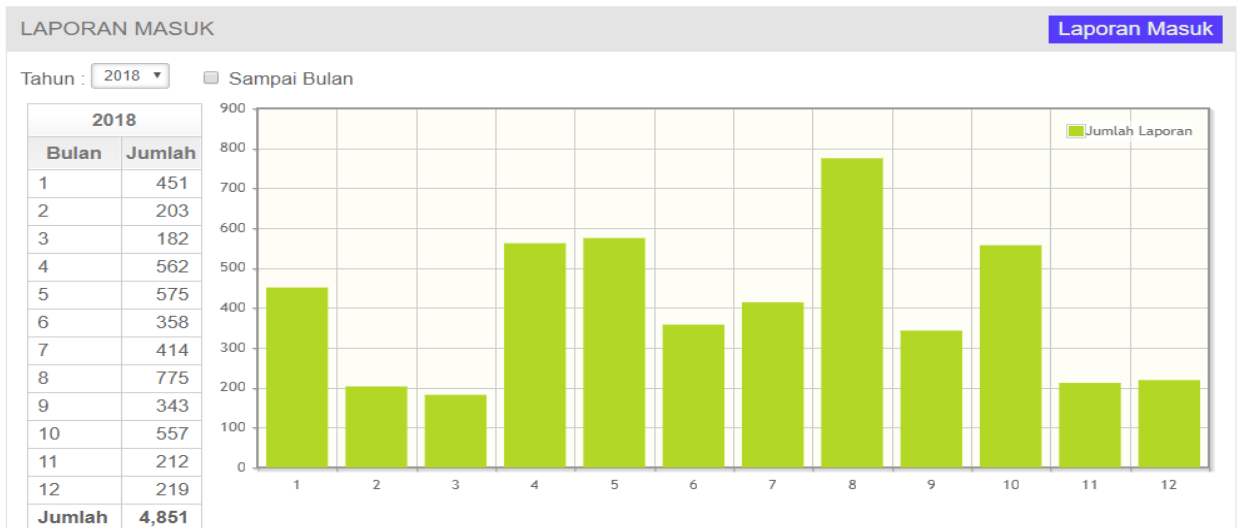
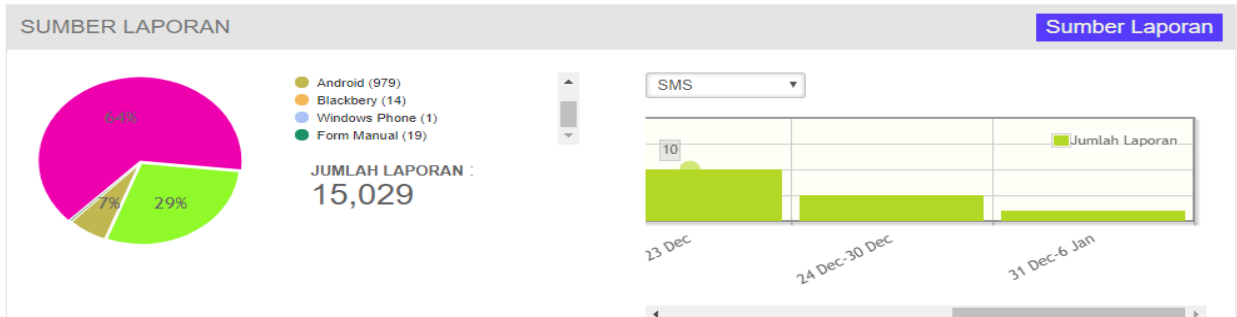
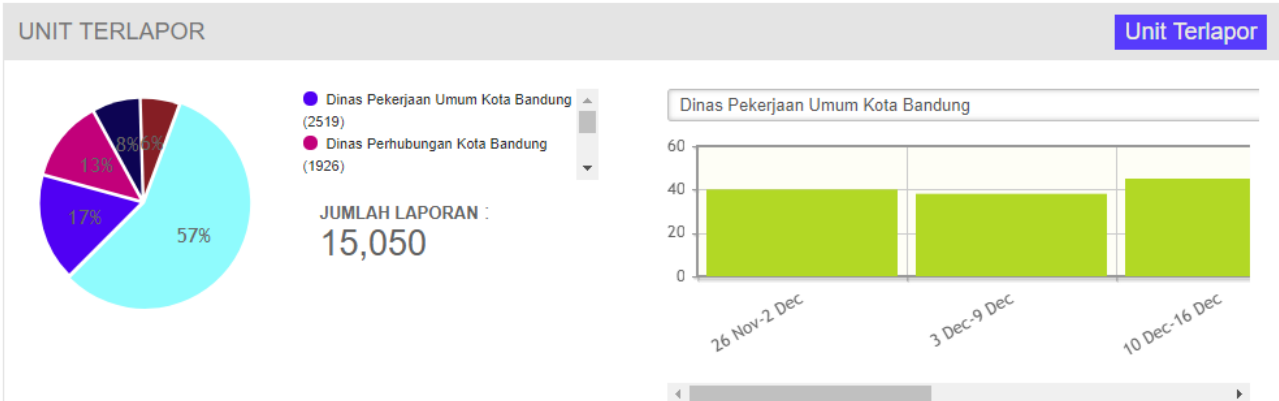
Dengan melihat capaian indikator dan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan untuk indikator “Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang di distribusikan ke Perangkat Daerah”, **telah berhasil mencapai target kinerja** sesuai Renstra Diskominfo yang telah ditetapkan.

TABEL 7. JUMLAH LAPORAN YANG MASUK KE UPT LAPOR!



15,050





f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang di distribusikan ke SKPD” pada Tahun 2018 ini adalah:

- ❖ Pengawasan langsung oleh Pimpinan Daerah (Walikota) serta menjadikan pengelolaan LAPOR salah satu tolak ukur penilaian kinerja.
- ❖ Tim Pengelola dan tugas-tugas fungsi dari masing-masing personal ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Bandung No. 488/Kep.703-Diskominfo/2016 Tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- ❖ Mempunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, di tetapkan melalui peraturan Walikota Bandung No. 1263 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang di distribusikan ke SKPD” pada Tahun 2018 ini adalah:

- ❖ Keanekaragaman Laporan sehingga tidak semua laporan dapat tertangani dalam 3 hari kerja (Tergantung tingkat kesulitan penanganan dan anggaran)
- ❖ Koordinasi Antara Kepala SKPD dengan Admin yang perlu di tingkatkan
- ❖ Perubahan Komposisi Admin karena adanya pergeseran pegawai (Mutasi atau Promosi)

- ❖ Belum ada mekanisme yang dapat memonitor terselesaikan tidaknya (secara real) suatu laporan dan juga untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat.
- ❖ Analisa data/ pengkatagorian bidang yang tampil di website LAPOR masih berskala nasional, belum disesuaikan dengan permasalahan masing-masing daerah

h. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Pengkatagorian disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di setiap kota.
- ❖ Perlu adanya mekanisme khusus untuk memonitor terselesaikan tidaknya (secara real) suatu laporan
- ❖ Perlu survei atas kepuasan layanan LAPOR secara reguler.

E. PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Perbandingan kinerja dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja kedepannya. Perbandingan kinerja dilakukan secara per-triwulan, dimulai dari melihat capaian kinerja Triwulan 1 Tahun 2018, sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2018 ini, dan perbandingan terhadap target Tahun 2017. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan baik capaian kinerja maupun presentase kinerja.

1. Perbandingan Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

Perbandingan kinerja per-triwulan dapat dilihat pada Tabel 5. Sedangkan perbandingan persentase kinerja per triwulan dapat di lihat pada Tabel 6.

TABEL 8. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian									
			2017		2018							
					TW1		TW2	TW3		TW4		
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Jumlah Integrasi Aplikasi Layanan Publik dan atau tata kelola Pemerintah	Aplikasi	7	9	-	-	2	2	3	3	5	5
2	Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan Sekolah	Lokasi	154	168	-	-	138	145	138	145	138	145
3	Koneksi Wifi/ Hotspot Area Publik dan Koneksi CCTV	Lokasi	102	113	-	-	111	123	111	123	111	123
4	Rata-rata Layanan Pengaduan Masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD	Hari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase		17,33								
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase		62,29								
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase		60,54								
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase		100								
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase		100								
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		79,78								
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio		84,03 : 15,97								
8	Tingkat Pemenuhan Standar Layanan Prima Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase		154,60								
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai		93,21								
10	Turunnya Temuan BPK/ Inspektorat	Persentase		100								

Keterangan:

T: Target C: Capaian

TABEL 9. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2017, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2017	2018			
				TW1	TW2	TW3	TW4
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Aplikasi	129%	-	100%	100%	100%
2	Jumlah Interkoneksi Antar SKPD dan Sekolah	Lokasi	109%	-	105%	105%	105%
3	Koneksi Wifi/ Hotspot Area Publik dan Koneksi CCTV	Lokasi	111%	-	111%	111%	111%
4	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Hari	100%	100%	100%	100%	100%
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	17,33				
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	62,29				
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	60,54				
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100				
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	100				
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79,78				
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	84,03 : 15,97				
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	154,60				
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	93,21				
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100				

Di Tabel 6, kita dapat melihat peta capaian kinerja mulai dari capaian akhir Tahun 2017 hingga Triwulan 4 Tahun 2018. Pada Tahun 2018 terlihat beberapa indikator sasaran berwarna abu yang lama sebelum direvisi menunjukkan tidak dilakukannya pengukuran

kinerja pada triwulan tersebut. Capaian yang tepat berwarna hijau menunjukkan capaian yang tepat memenuhi target yang didefinisikan di Renstra Diskominfo 2013-2018, dan yang berwarna biru menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target, yang didefinisikan di RESTRA Diskominfo 2013-2018.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2013-2018

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Renstra 2013-2018, maka data capaian dan presentase kinerja pada Tahun 2017, dan Tahun 2018, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaiannya Renstra, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Renstra, maupun untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Bandung secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* dari SKPD, dalam hal ini, Diskominfo Kota Bandung. Untuk Tahun 2019 IKU Diskominfo sudah berubah sesuai dengan Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023.

TABEL 10. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					TARGET TAHUN
			2017	2018				2019
				TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Aplikasi	9	-	2	3	5	-
2	Jumlah Interkoneksi Antar SKPD dan Sekolah	Lokasi	168	-	145	145	145	-
3	Koneksi Wifi/ Hotspot Area Publik dan Koneksi CCTV	Lokasi	113	-	123	123	123	-
4	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Hari	3	3	3	3	3	-

1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	17,33		-	-	-	
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	62,29		-	-	-	
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	60,54		-	-	-	
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100					
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	100					
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79,78					
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	84,03 : 15,97					
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	154,60					
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	93,21					
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100					

	Capaian kinerja yang berulang di setiap bulan/tahun
	Indikator Sasaran yang termasuk ke dalam IKU+
	Indikator IKU sebelum revisi

TABEL 11. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					TARGET TAHUN 2019
			2017	2018				
				TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Aplikasi	129%	n/a	100%	100%	100%	-
2	Jumlah Interkoneksi Antar SKPD dan Sekolah	Lokasi	138%	n/a	105%	105%	105%	-
3	Koneksi Wifi/ Hotspot Area Publik dan Koneksi CCTV	Lokasi	111%	n/a	111%	111%	111%	-
4	Rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Hari	100%	100%	100%	100%	100%	-

1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	17,33						
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	62,29						
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	60,54						
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100						
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	100						
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79,78						
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	84,03 : 15,97						
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	154,60						
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	93,21						
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100						

 Sudah mencapai target RENSTRA 2013-2018

 Melebihi target RENSTRA 2013-2018

Dari Tabel 8, terlihat bahwa ada 2 (dua) indikator yang pengukurannya melebihi target, 2 indikator sesuai target. Dari 4 indikator tersebut, ada di ulang pada setiap periode waktu tertentu. Artinya capaian kinerja sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhi capaian kinerja pada periode pengukuran berikutnya. Indikator –indikator tersebut adalah: Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang di distribusikan ke SKPD;

Dari tabel 8, terlihat bahwa dari 2 capaian kinerja Diskominfo telah memenuhi target dan 2 indikator melebihi yang ditetapkan di Renstra Dsikominfo tahun 2013-2018. Dari keadaan ini dapat dilakukan analisa, untuk indikator-indikator tersebut sekiranya dapat dilakukan evaluasi, apakah dapat ditingkatkan, baik target maupun dilakukan perubahan indikator secara keseluruhan menjadi indikator baru yang lebih SMART (Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time-bound).

F. KESIMPULAN/ PENUTUP

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Sasaran Pertama berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government dengan target 5 Aplikasi dengan realisasi 5 aplikasi (100%) atau sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sasaran Kedua yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan dengan 2 (dua) Indikator. Indikator Pertama yaitu Jumlah Interkoneksi antar SKPD dan sekolah dari target 138 lokasi terealisasi 145 lokasi (105%) atau melebihi target yang telah ditentukan , sedangkan Indikator Kedua yaitu Koneksi wifi/Hotspot area publik dan koneksi CCTV dari target 111 lokasi terealisasi 123 lokasi (111%) atau melebihi target yang telah ditentukan.

Sasaran Ketiga yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator rata-rata layanan pengaduan masyarakat secara online yang didistribusikan ke SKPD dengan target maksimal 3 hari dari jumlah pengaduan sebanyak 4.851 pengaduan terealisasi sebanyak 4.851 pengaduan (100%) atau sesuai dengan target.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620713 199803 2 006